Panel "Demokrasi dari Bawah"
Perkumpulan Praxis – ISSI
Gedung I i FISIP-UI
Ruang H501

MENAKAR PERLAWANAN POLITIK ELEKTORAL ;
Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu

Oleh Hendra Budiman ®

Abstraksi

Dalam tulisan ini dapat ditemui bagaimana 'cara rakyat' merespon momentum politik lokal, baik pemilihan anggota DPD maupun Pemilihan Kepala Daerah langsung dengan caranya sendiri untuk menghadapi berbagai kekuatan politik utama, elit politik dan praktek politik kelas menengah dalam konteks Bengkulu. Tulisan ini menunjukan bagaimana kelihaian rakyat memainkan peran politisi dalam Pilkada 2005 di Bengkulu. Peran ini dimainkan untuk memanfaatkan momentum Pilkada sebagai ajang "balas dendam" dan perlawanan diam-diam. rakyat mendayagunakan hak pilihnya sebagai kekuatan tawar dengan para politisi. Secara implisit, rakyat telah mengubah penampakannya sebagai politisi, yang mampu melakukan tekanan dan tawar menawar dengan rival politiknya.

Pengalaman dalam beberapa kali Pemilu telah mendidik rakyat menjadi "peserta" pendidikan politik, bukan pendidikan pemilih. Rakyat tidak bisa lagi dibeli dengan janji, atau semacam kontrak politik di atas kertas /Rakyat ingin mendapat keuntungan langsung dan dapat dirasakan secara bersama dalam Pilkada 2005. Dengan kasus Bengkulu ini anggapan-anggapan bahwa rakyat tidak sadar politik patut dipertanyakan, karena bisa jadi 'cara berpolitik' rakyat jauh lebih canggih dan ampuh dari gaya politik formal kelas menengah.

Pendahuluan

Dalam era Orde Baru (Orba), pemilu tidak dapat dikatakan sebagai lembaga strategis dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Partai-partai yang ada pada saat itu: PPP, Golkar dan PDI adalah sekedar lembaga yang harus ada dalam sistem demokrasi. Siapapun tahu, bahwa ketiga partai tersebut dalam ketiak rejim Orba di bawah komando Suharto. Kondisi demikian mempunyai dampak yang sangat luas, orang pada umumnya, bahkan kalangan akademisi dibuat bingung dalam membedakan antara negara, pemerintah dan orang-orang pemegang kekuasaan. Sehingga demokrasi palsu yang berjalan. Rakyat buta politik adalah dampak yang sengaja diinginkan.

Selayaknya pemilu mempunyai 3 hal penting jika ingin disebut sebagai lembaga strategis dalam kehidupan berdemokrasi. [1]

Pertama, pemilu menyediakan ruang kepada rakyat sebagai kesempatan untuk mengejawantahkan mandat institusional langsung. Mandat , yang sering disebut

---

® Penulis adalah aktivis Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB); Terlibat aktif dalam gerakan demokrasi 1990-an dan gerakan rakyat di Bengkulu.

[1] Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), " Peninggalan dan Kemunculan Kembali Orde Baru," Kecenderungan Politik Lokal di Bengkulu, Januari-Maret 2004

sebagai dengan kedaulatan rakyat tersebut, sangat penting dalam demokrasi modern, karena demokrasi yang tidak melibatkan rakyat hanyalah oligraki.

Kedua, Pemilu menyediakan kesempatan bagi perubahan politik secara damai melalui sirkulasi elite dan atau peneguhan komitmen baru. Kemungkinan menghadirkan muka dan atau kebijakan politik baru melalui pemilu adalah mekanisme membuat perubahan politik tanpa revolusi.

Ketiga, pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menjadi penentu atas kontestasi, kompetisi dan rivalitas politik serta pilihan nilai yang menentukan nasib mereka hingga pemilu berikutnya. Melalui pemilu rakyat ditempatkab sebagai penentu berbagai pilihan prioritas dan cara terbaik mencapai tujuan kolektif [2]. Jadi pada jaman Orba pemilu tidak layak disebut sebagai sarana demokrasi, Rakyat dininabobokkan, dibelenggu daya kritisnya dan akhirnya dijadikan barang mainan politik tanpa etika politik domokrasi yang wajar.

Seperti pemilu sebelumnya, banyak NGO atau Organisasi Rakyat yang mendapatkan proyek pemilu dari lembaga-lembaga donor seperti program pendidikan pemilih dan pemantauan Pemilu. Secara detail, kedua program ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pemilih (rakyat) dapat memahami mekanisme pemilu yang bermuara pada "kertas suara" masuk kedalam "kotak suara" dengan benar, dan itulah demokrasi dalam penyerahan mandat kedaulatan rakyat ke tangan para elit politik.

Dengan program pelatihan dan pemantauan dalam kerangka proyek donor tersebut, kepentingan pembangunan konsolidasi berhenti hanya pada proyek pemilu dan tidak ditarik lebih luas lagi. Pengalaman di Pemilu 1999 dan 2004 telah memberikan pelajaran berharga bagi kawan-kawan pro demokrasi dalam menelan buah pahit dari hasil pemilu yang mereka pantau.

Sekarang ini sudah terjadi suatu transisi dimana beberapa kelompok dan organisasi gerakan sosial telah mentransformasikan diri kedalam Gerakan Politik, meskipun dalam skala "Kampung" atau "Desa" [3] ataupun local, baik melalui jalur DPD dan Pilkada. Proses transisi ini menunjukan bahwa ruang politik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, justru harus dimasuki, dikuasai dan dipengaruhi oleh gerakan sosial kerakyatan.

Asal Muasal – Wacana Politik Praktis

Keterlibatan Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) bersama organisasi rakyat seperti Serikat Tani Bengkulu (STAB), Serikat Nelayan Bengkulu (SNeB) dan Himpunan Pedagang Mandiri Bengkulu (HPMB) dalam aktifitas politik praktis awalnya didasari oleh hasil asesment dan pendidikan analisis

[2] Daniel S, Kompas, 19 Maret 2004

[3] Konsep transisi gerakan social di Bengkulu menuju Gerakan politik secara jelas di utarakan dalam artikel Sekjen Serikan Nelayan Bengkulu (SNEB), Usin Abdisyah Putra, " Pemilu 2004 : Konsolidasi Demokrasi sebagai upaya Transformasi Gerakan Sosial ke Gerakan Politik Potret Gerak Indonesia."

data dari Clearing House. Badan ini kemudian diubah lagi menjadi satu proyek pendidikan pemilih PKBHB. Karena tugas dari clearing house sudah beralih menjadi pelaksana sosialisasi UU Pemilu.

Sejak bulan Januari hingga Oktober 2003, tidak kurang dari 20 (dua puluh) kali PKBHB melakukan sosialisasi UU Pemilu atas permintaan dari Partai Politik, pengurus partai politik, para calon anggota KPU dan Panwas, Forum Kepala Desa, Aliansi Masyarakat Sipil Bengkulu, KIPPda dan Pengurus STAB, SneB dan HPMB.

Terlibat Dalam Pemilihan Anggota DPD

Dalam pemilihan calon anggota DPD dari Bengkulu terdapat 18 calon yang ikut bertarung.Gerakan rakyat di Bengkulu sendiri merespon kesempatan untuk dapat berpolitik via mekanisme pemilihan DPD. Nama Muspani muncul pertama kali pada tanggal 18 April 2003, saat dilaksanakan Rapim III STAB. Selanjutnya diikuti oleh Rapat Pimpinan SneB II pada bulan Agustus 2003 dan terakhir oleh Rapat Anggota HPMB pada bulan Desember 2003. Jadi secara umum, Muspani dicalonkan dan calon dari tiga organisasi rakyat (STAB, SneB dan HPMB) di Bengkulu. Selanjutnya Muspani membuat kontrak politik dengan ketiga organisasi rakyat yang mencalonkannya tersebut secara terbuka didepan publik.

Muspani berlatar belakang pengacara dan aktif sebagai pembela Ham dengan mendirikan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu. Dengan KBHB, Muspani terlibat aktif melakukan pembelaan rakyat yang menjadi korban kebijakan penguasa dan kapitalisme perkebunan sejak tahun 1997 seperti pembelaan pada petani dalam kasus karet minim getah dari proyek TCSSP, petani yang dituduh mencuri sawit, penggusuran pedagang dan terdesaknya nelayan tradisional. Seluruh wilayah dampingan Muspani dan KBHB ini lalu di organisisr dan diberi wadah yang akhirnya menjadi sebuah gerakan sosial kerakyatan. Gerakan ini sekarang memperoleh moment politik dengan pencalonan Muspani sebagai figurnya. Menurut Muspani, ada keterkaitan antara peminggiran rakyat dengan proses politik yang berlangsung. " Bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu tidak memiliki akses (tidak berarti) bagi pusat-pusat kekuasan yang memiliki dan hak menyusun keputusan-keputusan politik yang justru akan mempengaruhi kehidupan kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu sendiri."[5]

Selama masa kampanye pemilu legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Muspani menghadiri tidak kurang 300 pertemuan di kelompok masyarakat pinggiran di Provinsi Bengkulu.

Berkat dukungan suara dari rakyat kecil itu, Muspani berhasil memperoleh sekitar 65.000 suara. Ia berada di nomor urut ketiga dalam perolehan suara pemilihan anggota DPD untuk Provinsi Bengkulu. Jumlah suara yang diperolehnya sedikit di atas perolehan suara PDI-P di Bengkulu yang memperoleh lima kursi untuk DPR. Menurut koran Kompas dalam liputannya tentang profil Muspani. "Kemenangan Muspani merupakan kemenangan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban." [6] Dan kemenangan tersebut menurut koran Kompas membuktikan bahwa

[5] Pidato Muspani dalam kapasitas sebagai Direktur Kantor Bantuan Hukum Bengkulu dalam pembukaan Kongres II Serikat Tani Bengkulu (STAB) Bapelkes 21 s.d 24 September 2001.

[6] *Kompas,* 10 juli 2004, "*Muspani, Lahirnya Seorang Pemimpin Rakyat*

sosial di 40 desa basis STAB se Bengkulu pada bulan Juni – Agustus 2001 guna menggali masalah dan potensi dari seluruh anggota STAB. [4]

Namun dibeberapa desa, beberapa anggota STAB mengajukan alternatif penyelesaian masalah melalui mekanisme politik yaitu pembentukan partai petani. Sejak saat itu wacana partai (perjuangan) politik sudah menjadi bahan pembicaraan di lingkungan anggota STAB. Meskipun saat Kongres STAB II bulan September 2001 dilaksanakan, tidak dihasilkan satu kesepakatan untuk membentuk partai (politik) petani. Karena alasan perangkat undang-undang belum dapat mengakomodir berdirinya partai politik lokal. Tetapi, sejak saat itu langgam organisasi sudah dikombinasikan dengan kerja-kerja kepartaian (politik).

Wacana tentang partai politik terus bergulir di tubuh STAB dalam Rapat Pimpinan I STAB bulan Juni 2002. STAB mengeluarkan satu resolusi untuk menginstruksikan kepada semua pengurus STAB yang menjadi anggota partai politik yang ada untuk mundur dari partai tersebut. Dari jajaran pengurus inti STAB baik tingkat pusat (BPP) maupun tingkat Kabupaten (BPD) ada 8 (delapan) orang yang langsung mengundurkan diri sebagai pengurus maupun anggota partai politik, yakni PDIP dan Golkar. Alasan dikeluarkannya satu resolusi ini, karena Blok Politik Bengkulu bersama dengan blok politik di 5 (lima) provinsi se Sumatera sudah akan membangun partai politik alternatif yang kemudian diberi nama: Perserikatan Rakyat.

Peluang Dalam Pertarungan Politik

Hingga akhir 2003, peluang untuk terlibat dalam pertarungan politik praktis bagi PKBHB dan organisasi rakyat masih tertutup. Undang-undang belum dapat mengakomodir pembentukan partai politik lokal. Sementara pembentukan partai politik tingkat nasional sangat ditentukan oleh kesiapan kawan-kawan jaringan di beberapa provinsi di luar Bengkulu.

Ditengah menunggu momentum, hadir UU Pemilu baru yang membuka peluang masuk dan terlibatnya organisasi masyarakat sipil di luar partai politik yang ada yaitu melalui institusi DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Maka Divisi Hukum PKBHB, terus mengikuti perkembangan pembahasan UU Pemilu sejak bulan Oktober 2003 hingga Februari 2004. Kerja dari Divisi Hukum PKBHB kemudian dikembangkan dengan membentuk satu badan *clearing house* pemilu.

Tugas dari clearing house pemilu adalah menjadi sentral informasi kepemiluan bagi semua pihak yang membutuhkan data dan informasi tentang pemilu. Badan ini terus melakukan pengumpulan dan pengolahan data hingga akhir 2003. Meskipun UU pemilu disyahkan pada tanggal 19 Februari 2003, namun paket UU Politik lainnya masih terus dibahas oleh DPR hingga Juli 2003, dan peraturan KPU dan Panwas masih terus lahir. Clearing House PKBHB ini kemudian menjadi sentral informasi yang selalu diakses oleh anggota KPU di Bengkulu (hingga 5 bulan pertama setelah anggota KPU dilantik), karena sistem database yang mereka miliki belum memadai. Para anggota Panwas hingga 3 bulan pertama setelah dilantik juga tetap menggunakan data Clearing House. Berbagai lembaga pemantau dan pelaksana pendidikan pemilu seperti KIPP dan Forum Rektor bahkan partai politik di Bengkulu jugamenggunakan

[4] Dokumen KBHB, Notulensi Workshop " Refleksi dan Evaluasi Analisis Sosial (ANSOS), Agustus 2002.

pengorganisiran rakyat adalah kunci bagi pemberdayaan politik partisipatoris." Kemenangan Muspani memberikan inspirasi di kalangan petani, nelayan, dan pedagang kecil di Bengkulu bahwa mereka bisa menjadi penentu dalam kehidupan politik." [7]

Perolehan Suara 5 Besar Calon Anggota DPD Bengkulu[8]

No	nama	Jumlah suara
1	Bambang Suroso	155.650
2	Mahyudin Sobri	99.367
3	Muspani	64.976
4	Eni Khairani	56.078
5	Samlan	55.928

Pilkadal di Bengkulu

Senin, 27 Juni 2005 Provinsi Bengkulu menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung (selanjutnya disingkat Pilkada) untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta memilih Bupati dan Calon Bupati di enam kabupaten, yakni kabupaten Muko muko, Kaur, Seluma, Kepahiang, Lebong dan Rejang Lebong. Hasil penghitungan suara sementara KPU -- hingga 1 Juli 2005 -- untuk Pilkada Gubernur, pasangan Agusrin M. Najamuddin dan M. Syamlan Lc masih unggul dengan perolehen suara 24%. Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Urutan kedua, ditempati oleh pasangan Muslihan DS dan Rio Capela dengan perolehan suara 21%. Muslihan – Rio maju sebagai calon atas dukungan Partai Demokrat dan PAN. Unggulnya pasangan PKS ini ketimbang pasangan partai lain sungguh mengejutkan semua pihak. Hampir tidak ada satupun pengamat atau pemerhati (tepatnya penonton) politik yang mempredikasi bahwa pasangan PKS akan memperoleh suara melampaui kandidat lain. Dalam pilkada putaran kedua, Oktober, 2004, pasangan yang didukung PKS ini berhasil memangnkan perarungan dan menjadi Gubernurdan wagub Bengkulu.

Respon Rakyat

Dalam Pilkadal di Bengkulu telah terjadi tiga respon rakyat yang menonjol yaitu; *Pertama*, semakin tingginya angka pemilih (terdaftar) tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan Pemilu April 2004 dan Pemilihan Presiden putaran pertama dan kedua (selanjutnya disingkat Pilpres 2004). *Kedua*, kecendrungan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak berlandaskan pada partai politik yang diikutinya; *Ketiga*, makin maraknya pragmatisme di kalangan rakyat pedesaan.

---

[7] *Kompas*, 9 Juli 2004 *Gairah Organisasi Rakyat di Bengkulu*

[8] KBHB, Data Panitia Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Jika fenomena itu dapat diidentifikasi sebagai bentuk dari perlawanan rakyat, kita bersyukur bahwa sejarah telah memberikan sumbangan gagasannya untuk melengkapi daftar bentuk-bentuk perlawanan rakyat dalam katagori pembangkangan. Dalam konteks gerakan sosial, taktik ini dapat memberikan alternatif baru perlawanan atas kekuasaan (politik) yang dominan. Namun, jika tidak berhati-hati, gerakan pembangkangan ini dapat berbalik arah saat kita sendiri mengubah wujud kekuatan politik sebagai kontestan Pemilu di tahun 2009 nanti.

Tidak Menggunakan Hak Pilih

Gerakan untuk tidak memilih dalam pemilu oleh apra atkivis -- sejak tahun 1971 disebut dengan Golongan Putih (Golput). Pada Pilkada Juni 2005, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 34 %. Dari 1.064.010 pemilih terdaftar, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2005, hanya berkisar 700.000 orang atau hanya 66 %. Selebihnya tidak menggunakan hak pilih.[9]

Untuk Pilkada 2005, kecil kemungkinan faktor teknis bahwa seorang pemilih keliru cara mencoblos menjadi sebab meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya Karena Pilkada 2005 ini adalah pemilihan umum secara langsung yang kelima sejak April 2004. Jadi kesimpulannya bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam Pilkada Juni 2005 di Bengkulu, dilakukan dengan sengaja untuk menjadi Golput. Jumlah surat suara tidak sah ini kurang lebih 24.000 suara atau 2,5%

Alasan lain pemilih tidak datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Ada dua faktor penyebabnya: (1) sengaja tidak datang meskipun sudah menerima kartu pemilih. Alasan yang kerap dikemukan, diantaranya: tidak ada gunanya (apatis), bingung untuk menentukan pilihan (ragu), dan ada kesibukan atau pekerjaan yang lebih penting (enggan). (2) Tidak datang karena tidak menerima kartu pemilih dan kartu undangan dari KPU.

Faktor kedua ini yang dalam satu minggu menjelang hari pemungutan suara, menjadi isyu dan berita santer di media massa lokal. Banyak pemilih belum menerima kartu pemilih. Alternatif ditawarkan DPRD Kota Bengkulu agar pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, dapat menggunakan kartu pemilih Pilpres II. Namun usulan ini ditolak oleh KPU Kota Bengkulu. Alasannya, semua pemilih terdaftar sudah mendapat kartu pemilih. Jika mereka tidak mendapatkan kartu pemilih, artinya tidak masuk dalam DPT sebagaimana yang telah didata oleh Pemda. Diantaranya Agusrin (calon Gubernur) yang tidak mendapat kartu pemilih, karena baru tiga bulan terakhir berdomisili di Bengkulu. Jumlah surat suara yang tidak terpakai karena pemilih terdaftar tidak hadir di TPS lebih dari 300.000 atau 31,5%.

Rakyat Bisa Memilih Siapa Saja

Bengkulu adalah provinsi "kuning". Klaim oleh fungsionaris Golkar memang cukup beralasan. Paling tidak untuk dua kali Pemilu 2004, Bengkulu nampak memang berwajah kuning. Pada pemilu legislatif 2004 lalu, Golkar unggul dengan perolehan suara di tingkat provinsi 171.518 suara atau 25%.

Pilkada pemilihan Gubernur dan Bupati 2005 meruntuhkan asumsi itu. Calon Gubernur dari PKS unggul dengan perolehan 24 %. Sedangkan calon Gubernur dari

[9] Sumber: KBHB, Data Panitia Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Golkar, terpuruk diurutan keempat dengan hanya memperoleh 12%. Padahal jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2004, PKS hanya menduduki urutan ke tiga setelah Golkar, PDIP dan PAN dengan total suara 55.936 atau 8,1%. Hanya jika dibandingkan dengan pemilu 1999, peningkatan suara PKS cukup berarti, yang sebelumnya hanya mendapat 17.768 atau 1 kursi kini mendapat 5 kursi di DPR Provinsi Bengkulu.

Klaim Golkar semakin kabur, saat menengok hasil perolehan suara sementara Pilkada Bupati di Rejang Lebong. Suherman – Iqbal Bastari, calon Bupati dari gabungan PAN, PKPB dan PBR menang mutlak dengan perolehan 40,5%. Padahal Rejang Lebong adalah basis utama Golkar yang selalu mereka klaim selama ini. Sementara dalam Pilkada Bupati Seluma, Murman Effendi – Bustami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PKPI merajai dengan perolehan suara 27,3%, sedangkan calon yang diusung oleh Partai Golkar, yakni Sumardi hanya mendapat 13,3 % atau urutan kelima dari enam calon Bupati Seluma.

Pemilih Bengkulu rupanya tidak terpatok oleh klaim partai. Hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta lapangan yang menunjukan "kekaburan" itu. Sudah lima kali Bengkulu melakukan Pemilu sejak tahun 2004, dan hasilnya memang diluar dugaan. Mari kita ambil contoh Di kecamatan Manna.

Di Kecmatan Manna, Agusrin - Syamlan (calon Gubernur dari PKS) mendulang suara mutlak 51,2% atau memperoleh 31.629 suara dari 61.728 total suara sah. Padahal PKS saat Pemilu 2004, menduduki urutan kelima dalam ranking perolehan suara untuk DPR Provinsi. Pada Pilpres putaran pertama, Megawati mendapat suara 35,61%. Anehnya, dalam Pemilu legislataif 2004, PDIP dapat ditekuk oleh Golkar. Kemenangan Megawati pada Pilpres I, amblas saat SBY menang dengan 4.349 suara, sedangkan Megawati hanya mendapat 3.821.

Kenyataan di atas mengambarkan tidak sederhana klaim dukungan politik itu. Memang "omong besar" seperti ini sebagai alat tawar dari para politisi dan calo politik di depan kandidat Gubernur atau Bupati, yang ujung-ujungnya ingin memperoleh keuntungan finansial. Seperti layaknya dagang sapi. Tetapi, jika "omong besar" itu dijadikan dasar oleh kandidat dalam menyusun strategi pemenangan, niscaya akan gagal total. Karena kenyataannya, realitas politik di tingkat desa tidak statis seperti dugaan semula.

Pragmatisme Dalam Pemilihan Langsung

Uang faktor penentu kemenangan, begitu anggapan umum para penonton politik. Jawabannya bisa ya, juga tidak jika disinkronkan dengan kenyataan yang terjadi. Contoh dalam Pilkada 2005 di Bengkulu. Agusrin adalah seorang pengusaha dari Jakarta. Ia selalu memamerkan mobil Mercy-nya saat kampanye. Hanya untuk membentuk citra sebagai pengusaha sukses. Sementara. Sudirman Ail adalah mantan Kapolda Jawa Barat yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan didayagunakan secara penuh dalam Pilkada 2005. Sementara pasangan Sudirman, Syahrir AB adalah mantan birokrat Bengkulu yang juga kaya.

Citra sebagai orang kaya, bisa menjadi senjata makan tuan ditengah kenyataan pragmatisme yang semakin menguat di masyarakat. Citra ini justru "dimanfaatkan" dengan sebaik-baiknya oleh para pendukung maupun warga masyarakat umum. Caranya: menyedot uang sebanyak-banyaknya, soal pilihan itu urusan lain. Benar mereka pendukung tetapi bukan pemilih.

Sikap pragmatisme sesungguhnya bukan watak asli pemilih Bengkulu. Paham ini disosialisasikan dan ditumbuhkembangkan justru oleh para politisi sendiri. Saat Pemilu 2004, persemaian paham ini mulai ditumbuhkan. Para Caleg dan calon DPD, dalam kampanye dan menemui pendukungnya memberikan "bingkisan" berupa bola voli, net, baju kaos, baskom, piring, semen, sampai-sampai mengaspal jalan desa.

Namun rakyat di desa bukanlah wilayah yang tertutup dan hanya menerima satu calon saja. Hampir semua calon masuk. Para kandidat (politisi) melakukan hal serupa. Namun ketika ditanya siapa yang akan dipilih dengan diplomatis akan dijawab oleh si petani, *"yang paling baik."*

Setelah belajar dengan fasih bagaimana cara "memanfaatkan" -- atau menurut Sun Tzu, cara menipu -- dalam Pemilu 2004, rakyat hampir menemukan formulanya: mengubah "virus" menjadi "serum". Serum sebagai obat penawar atau anti toksin, diambil dari virus yang sudah dilemahkan. Jika dalam Pemilu 2004, para tim sukses yang aktif maka kini bergeser pada komunitas atau kumpulan warga yang menggantikannya. Karena saat Pemilu 2004, rakyat merasa "ditipu" oleh kandidat dan tim sukses. Maka, saatnya mereka melakukan negosiasi secara langsung. Tidak jamanya lagi klaim politik dilakukan oleh para calo dan elit partai. Tidak jamanya lagi proposal diajukan oleh para elit desa kepada para kandidat. Sekumpulan warga mengambilalih inisiatif dan pekerjaan negoissi politik ini. Rakyat mengajukan "proyek desa" yang langsung dapat dinikmati. Seperti perkatan seorang petani. " *Kalau mau menang, ya perbaiki jalan desa. Sejak dulu, jalan di desa ini rusak berat, hingga hasil bumi sulit untuk dipasarkan ke luar*".

Singkatnya rakyat butuh bukti dan bukan janji. Tuntutan merekapun tidak terlampau muluk-muluk sebagaimana yang kerap dilakukan oleh mahasiswa dan elemen kelas tengah lainnya seperti berantas korupsi, tegakan hukum, pendidikan murah dan hal normatif lainnya yang biasanya dituangkan dalam kontrak politik.

Di Bengkulu, warga desa tidak melakukan kontrak politik, tapi langsung meminta kebutuhan konkrit saat itu juga.Tidak menunggu hasil: menang atau kalah. Beragam permintaannya: perbaiki jalan dan jembatan, bea siswa untuk anak miskin, pipa paralon untuk saluran air, kursi dan tenda untuk balai desa, *seng* untuk atap rumah para warga desa dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan mendesak semua warga saat itu. Hampir tidak diketemukan, komitmen yang dituangkan dalam kontrak politik.

Rakyat juga kreatif dalam membuat jenis kontrak politik sebagaimana dikemukakan oleh ketua kelompok tani di desa Tawang Rejo, kabupaten Seluma. Mereka meminta modal sebanyak Rp. 2 juta rupiah sebagai pendukung usaha koperasi desa. Isi kontraknya, jika kandidat kalah atau tidak dimenangkan oleh seluruh anggota koperasi, uangnya bisa ia tarik kembali. Kalaupun tidak, kandidat itu tetap menjadi anggota koperasi yang memiliki iuran sebanyak Rp 2 juta rupiah. Artinya uangnya tidak hilang percuma. Money politic ? Entahlah !

Bagi rakyat dalam Pilkada 2005, kalah atau menang kandidat yang mereka dukung, mereka sudah mendapat "keuntungan" sebelumnya. Meskipun hanya berbentuk materi belaka. Pragmatisme lebih pada perwujudan keuntungan materi yang bisa dinikmati secara bersama oleh seluruh warga desa.

Hak Pilih Sebagai Kekuatan Tawar Rakyat

Dari peristiwa Pemilu 2004 dan Pilkada 2005, tesis baru justru muncul. Tesis itu adalah rakyat mendayagunakan hak pilihnya sebagai kekuatan tawar dengan para politisi. Memanfaatkan atmosfer politik uang sebagai senjata untuk menekan para politisi. Secara implisit, rakyat telah mengubah penampakannya sebagai politisi, yang mampu melakukan tekanan dan tawar menawar dengan rival politiknya. Pengalaman dalam beberapa kali Pemilu telah mendidik rakyat menjadi "peserta" pendidikan politik, bukan pendidikan pemilih.

Beberapa aktivis unsur NGO, Ormas dan akademisi ada yang merespon kenyataan itu dengan pro dan kontra. Kubu yang pro menyatakan bahwa rakyat telah mampu melakukan "perlawanan" dalam bentuk yang berbeda. Bahwa negosiasi politik dilakukan karena yang dihadapannya diposisikan sebagai rival (musuh) bukan sebagai kawan. Sebagaimana misi dari gerakan, untuk terus memacu perlawanan rakyat atas paham dominan. Kubu yang kontra sebaliknya menyesalkan bahwa rakyat sudah terikut arus dalam kecendrungan pragmatisme sebagaimana tradisi yang hidup dilingkungan para elit partai atau politisi. Apalagi para aktivis NGO, Ormas dan akademisi yang terlibat dalam tim-sukses Gubernur atau Bupati, menemui rakyat dengan tampilan yang tidak lagi seperti dulu: lugu, bodoh dan bersahaja. Kesimpulannya rakyat kita ternyata sudah cerdas.

Belajar Politik Dari Rakyat

Kosa kata politik selama ini selalu disandingkan dengan cara pandang dan persepsi dari para elit dan kelas tengah. Ilmu politik diajarkan secara teoritis di bangku kuliah, khususnya di fakultas ilmu politik. Para pengamat, penonton bahkan pemerhati politik yang sering bikin ulasan yang a-historis dan aneh-aneh itu datang dari kelas tengah. Politik dalam pengertian praktis (real politic dan political game) juga masih didominasi oleh para pelaku dari kelas tengah. Sehingga makin memperkuat kepercayaan bahwa politik itu milik kelas tengah (borjuasi). Rakyat dalam hal ini diposisikan hanya sebagai object atau korban. Bisa kita baca dari pernyataan seperti, "jangan bodohi rakyat", "rakyat terus ditipu oleh para elit partai", "Pemilu jangan mengorbankan rakyat". Meskipun pernyataan ini pro atas penindasan rakyat tetapi tetap saja memposisikan rakyat sebagai object politik. Bagaimana jika kenyataannya bahwa rakyat sebagai pelaku, "Rakyat menipu para politisi". Apakah, dominasi pengetahuan dan praktek atas ilmu politik masih dimiliki oleh kalangan klas tengah ?.

Di Bengkulu terbukti rakyat juga mempunyai kesadaran dan logikanya sendiri untuk menjawab sikap pembangkangannya yang berbeda dari logika mahasisiwa atau ataktivis NGO. Ibu Samsiah, seorang pedagang sayur di Pasar Minggu, Kota Bengkulu mengatakan, "*milih atau tidak milih, saya juga tetap jadi tukang sayur. Lalu apa bedanya ?*". Sikap apatis yang berbeda dengan cara pikir kelas tengah. Seorang petani petani dari kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara juga memberikan logikanya sendiri mengapa memilih golput. " *apa gunanya milih, kemarin saja milih caleg, setelah terplih sudah lupa dengan kami. Lebih baik, ngurus usaha marning (jangung brondol) saja, ada untungnya.*" Sementara petani di kecamatan Lebong Utara bersikap golput dengan alasan. *"saya binggung mau milih siapa, semua (calon Gubernur) itu keluarga. Lebih baik saya netral saja."*

Prilaku elit partai dan calo politik yang melakukan "politik atas nama", serta merta telah dilawan oleh komunitasnya sendiri. Rakyat sebenarnya tidak merasa

keberatan "diatasnamakan" tetapi harus jujur dan terbuka. *"Mereka yang untung, kita yang buntung. Mereka -- elit dan calo politik -- dapat uang kita yang dibawah setengah mati kerja".* Ujar salah seorang ketua kelompok paguyuban tani, saat mereka mengetahui bahwa mereka "dijual" dan "diatasnamakan" secara diam-diam. Tindakan ini dilawan dengan membelot ke calon lain. Pembelotan terjadi semata karena tidak mematuhi tata krama organisasi, dan nilai-nilai kepatutan. Padahal, pemberian suara ke calon lain -- yang bukan berasal dari partai yang sama atau ikatan suku yang sama -- mereka tidak memperoleh keuntungan materi apapun. Hanya karena marah atas kelakuan para elit dan calo yang selalu "menjual" dukungan politik. Apa kata rakyat pendukung, *"biar tahu rasa dia -- elit partai dan calon politik-- ,kalau kita tidak turut apa kehendaknya".*

Demikian juga tindakan rakyat melakukan tawar menawar dengan kandidat. Ada barang ada harga, begitu prinsip "dagangnya". Rakyat tidak bisa lagi dibeli dengan janji, atau semacam kontrak politik di atas kertas. Rakyat ingin mendapat keuntungan langsung dan dapat dirasakan secara bersama dalam Pilkada 2005. Bahkan ada yang mengatakan, *"kapan lagi kita punya jalan yang baik. Pilkada ini kesempatan kita".* Trik seni menipu yang kerap digunakan oleh para politisi saat berhadapan dengan rakyat, kini digunakan oleh rakyat sendiri.

Salah satu peristiwa yang bisa dirujuk yaitu mobilisasi massa saat kampanye di satu kecamatan oleh tiga orang kandidat calon Gubernur berbeda, namun dihadiri oleh massa yang sama. *"kan lumayan dapat uang transport dan nasi bungkus".* Begitu juga saat mereka diberikan "bingkisan" oleh semua kandidat, diterima semua tidak ada yang ditolak. *"kami tidak minta, ini dikasih mereka, ya kita terima. Masa rezeki ditolak. Masalah memilih itu pilihan masing-masing tidak bisa dipaksakan".* Penerimaan uang atau materi diterima oleh rakyat, hanya ingin "memanfaatkan" situasi dalam Pilkada 2005 ini. Mereka tidak mau lagi tertipu ketika Pemilu 2004 lalu. Kalaupun calon mereka menang atau kalah, tidak hinggap lagi rasa penyesalan dan sakit hati karena merasa "ditipu" oleh para politisi.

Memang timbul kekhawatiran, sikap pragmatisme dan *politiking* yang mulai lihai dimainkan oleh rakyat merasuk juga dalam tubuh gerakan rakyat Apalagi jika gerakan ini akan ber-metamorforsa dalam wujud kekuatan politik alternatif dalam Pemilu 2009. Hanya indikasi kearah itu belum menunjukan kuatnya virus ini.

Bagaimanapun, kelihaian rakyat memainkan peran politisi dalam Pilkada 2005 ini, didasarkan pada kemarahan dan perlawanan mereka atas pengalaman Pemilu 2004 lalu. Peran ini dimainkan untuk memanfaatkan momentum Pilkada sebagai ajang "balas dendam" dan perlawanan diam-diam. Bukan karena watak dan karakter dasar dari rakyat sesungguhnya.

Kedepan, semua elemen yang pro gerakan rakyat harus mampu menangkap sinyal ini sebagai dasar melakukan pendidikan politik yang kontinyu. Pendidikan pemilih yang instan secara kasat mata belum punya pengaruh yang berarti pada rakyat saat menentukan sikap politiknya. Pendidikan pemilih hanya menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan politik yang harus dilakukan terus menerus.

Pendidikan politik harus menarik semua peristiwa politik nyata sebagai pembelajaran penting dan memberikan kerangka serta arah - tujuan yang sesuai dengan misi perlawanan rakyat. Pendidikan politik harus bersumber pada situasi dan dinamika matrial yang terus berkembang dan berubah. Pendidikan politik bukanlah dogma statis memilki standar yang bisa digunakan disegala zaman. Terakhir,

pembelajaran politik sudah seharusnya merujuk pada pengalaman konkrit yang dilakukan oleh rakyat dimana mereka sendiri memainkan peran baik sebagai pelaku maupun objeknya. Atau, kita memang harus lebih banyak berguru pada rakyat di arena pertarungan politik nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), " Peninggalan dan Kemunculan Kembali Orde Baru," Kecenderungan Politik Lokal di Bengkulu, Januari-Maret 2004.
- Notulensi" Refleksi dan Evaluasi Analisis Sosial (ANSOS), Agustus 2002.
- "Data Panitia Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)"

Muspani," Perluasan Partisipasi Politik Rakyat," Pidato Muspani, Direktur Kantor Bantuan Hukum Bengkulu dalam pembukaan Kongres II Serikat Tani Bengkulu (STAB) Bapelkes 21 s.d 24 September 2001.

Putra,Usin Abdisyah " Pemilu 2004 : Konsolidasi Demokrasi sebagai upaya Transformasi Gerakan Sosial ke Gerakan Politik Potret Gerak Indonesia." KBHB, 2004.

Wisudo, P Bambang ," Muspani, Lahirnya Seorang Pemimpin Rakyat,' Kompas, 10 juli 2004.
-" Gairah Organisasi Rakyat di Bengkulu, "*Kompas*, 9 Juli 2004